



KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PK.3 TAHUN 2018
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan,

- Menimbang :
- a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses, dan penggunaan serta penyusutan arsip;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Klasifikasi Arsip Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip atau pengelompokan Arsip urusan atau masalah secara logis, kronologis dan sistematis berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3. Fungsi Substantif adalah fungsi lini yang merupakan kegiatan pokok/utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Fungsi Fasilitatif adalah fungsi penunjang untuk melengkapi dan memperlancar pekerjaan substantif.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan angka dan huruf.

- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,



A. HARIS ACHADI

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. FUNGSI FASILITATIF
PR PERENCANAAN

01 Rencana dan Program

01 Rencana dan Program Jangka Panjang

Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana dan program jangka panjang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan, antara lain:

- *Master Plan* (Rencana Induk)

02 Rencana dan Program Jangka Menengah

Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana dan program jangka panjang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan, antara lain:

- Rencana Stratejik;
- Indikator Kinerja Utama (IKU).

03 Rencana dan Program Jangka Pendek

Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana dan program jangka panjang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan, antara lain:

- Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- Penetapan Kinerja (PK).

04 Rencana Kerja Anggaran

- Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP);
- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L);
- Penelaahan RKA-K/L;

- Materi Penyampaian Nota Keuangan;
- Materi Pembahasan RAPBN dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR RI.

02 Evaluasi dan Pelaporan

01 Evaluasi Program LPNK/Unit Kerja

Naskah dinas yang berkenaan dengan *monitoring*, evaluasi, penyiapan dan penyusunan laporan rencana, program dan rencana anggaran LPNK/unit kerja, antara lain:

- Laporan Bulanan;
- Laporan Triwulan;
- Laporan Tahunan;
- Laporan Pakta Integritas.

02 Evaluasi Kinerja LPNK/Unit Kerja

Naskah dinas yang berkenaan dengan evaluasi kinerja LPNK/unit kerja, antara lain:

- Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP);
- Rencana Aksi;
- Pemantauan Rencana Aksi;
- Capaian Kinerja;
- Laporan *Monitoring*;
- Laporan Insidentil.

KS KERJA SAMA

01 Kerja Sama Dalam Negeri

01 Instansi Pemerintah

Naskah dinas yang berkenaan dengan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, antara lain:

- Kementerian;
- Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
- BUMN;
- Pemerintah Daerah.

02 Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi

Naskah dinas yang berkenaan dengan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi.

- 03 Organisasi Kemasyarakatan
Naskah dinas yang berkenaan dengan koordinasi dan kerja sama organisasi kemasyarakatan.
 - 04 Media Massa
Naskah dinas yang berkenaan dengan koordinasi dan kerja sama media massa.
 - 05 Dengar Pendapat/*hearing* DPR-RI
Naskah dinas yang berkenaan dengan koordinasi dan kerja sama DPR-RI (dengar pendapat/*hearing* dan Nota Jawaban DPR RI).
-
- 02 Kerja Sama Luar Negeri
 - 01 Hubungan Kerja Sama Bilateral
Naskah dinas yang berkenaan dengan peninjauan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan sampai dengan pelaporan hubungan kerja sama bilateral.
 - 02 Hubungan Kerja Sama Regional
Naskah dinas yang berkenaan dengan peninjauan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan sampai dengan pelaporan hubungan kerja sama regional.
 - 03 Hubungan Kerja Sama Multilateral
Naskah dinas yang berkenaan dengan peninjauan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan sampai dengan pelaporan hubungan kerja sama multilateral.
 - 04 Hubungan Kerja Sama dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan nonPBB.
Naskah dinas yang berkenaan dengan peninjauan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan sampai dengan pelaporan hubungan kerja sama dengan badan-badan PBB maupun badan-badan internasional nonPBB.

03 Bantuan Teknis

01 Bantuan Keuangan

Naskah dinas yang berkenaan dengan bantuan keuangan berupa pinjaman atau hibah dari luar negeri yang terdiri dari, penjajakan bantuan keuangan, persiapan/penerimaan bantuan keuangan, administrasi dan laporan, evaluasi dan laporan bantuan keuangan, antara lain:

- dokumen permohonan pinjaman luar negeri (*blue book*);
- dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (*grey book*);
- Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU), dan sejenisnya;
- dokumen *loan agreement* seperti *draft agreement*, *legal opinion*, surat menyurat, tender dsb.

02 Bantuan Tenaga Ahli

Naskah dinas yang berkenaan dengan bantuan tenaga ahli yang terdiri dari, penjajakan bantuan tenaga ahli, penerimaan/penempatan tenaga ahli, perpanjangan bantuan tenaga ahli, evaluasi dan laporan bantuan tenaga ahli.

03 Bantuan Bea Siswa

Naskah dinas yang berkenaan dengan bantuan beasiswa dari/ke luar negeri terdiri dari, penjajakan bantuan proyek, penerimaan/pemberian bantuan proyek, evaluasi dan laporan bantuan proyek.

04 Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Internasional

01 *Monitoring* Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Internasional.

Naskah dinas yang berkenaan dengan *monitoring* pelaksanaan konvensi dan perjanjian internasional mulai dari persiapan/perencanaan sampai dengan pelaporan.

- 02 Pembahasan Konvensi dan Perjanjian Internasional.
Naskah dinas yang berkenaan dengan pembahasan konvensi dan perjanjian internasional mulai dari persiapan/perencanaan sampai dengan pelaporan.
- 03 Tindak Lanjut Pelaksanaan Konvensi dan Perjanjian Internasional.
Naskah dinas yang berkenaan dengan tindak lanjut pelaksanaan konvensi dan perjanjian internasional sejak dari persiapan/perencanaan sampai dengan pelaporan.
- 05 Kunjungan Misi Luar Negeri/Perwakilan Asing
- 01 Penerimaan Kunjungan Misi/Perwakilan Asing
Naskah dinas yang berkenaan dengan penerimaan kunjungan misi/perwakilan asing mulai dari persiapan/perencanaan sampai dengan pelaporan.
- 02 Penyediaan Bahan Informasi
Naskah dinas yang berkenaan dengan penyediaan bahan informasi kunjungan misi/perwakilan asing.
- 06 Pertemuan Ilmiah
Naskah dinas yang berkenaan dengan kongres, konferensi, seminar dan/atau lokakarya yang diselenggarakan atas bantuan/kerja sama dengan luar negeri yang diadakan baik di dalam/luar negeri mulai dari perencanaan sampai dengan laporan ilmiah.

KU KEUANGAN

- 01 Pelaksanaan Anggaran
- 01 Penyusunan Anggaran
Naskah dinas yang berkaitan dengan penyusunan anggaran dan pendapatan belanja negara terdiri dari:
- ketetapan pagu indikatif/pagu sementara;
 - ketetapan pagu definitif;
 - Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

- revisi anggaran;
- ketentuan/peraturan yang menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran.

02 Pendapatan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pendapatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri dari:

- Surat Setoran Pajak (SSP);
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- piutang negara;
- surat tagihan; dan
- sewa Barang Milik Negara (BMN).

03 Belanja

Naskah dinas yang berkenaan dengan pelaksanaan belanja barang/jasa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi, belanja gaji, tunjangan, barang pakai habis, barang inventaris, jasa beserta data pendukungnya, terdiri dari:

- belanja gaji;
- belanja tunjangan;
- belanja barang pakai habis;
- belanja perjalanan dinas;
- belanja barang inventaris (peralatan kantor, tanah/bangunan, kendaraan, software, instalasi/jaringan dan peralatan SAR).

04 Penatausahaan Belanja

Naskah dinas yang berkenaan dengan penatausahaan pembelanjaan/pengeluaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri dari:

- dokumen pelaksanaan belanja barang/jasa pemerintah meliputi, barang pakai habis, barang inventaris, jasa beserta data pendukungnya (dokumen uang muka dan data pendukungnya, penagihan/*invoice*, kwitansi pembayaran, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta data pendukungnya, copy faktur pajak, nota kredit), berita acara pemeriksaan, berita acara

penyelesaian pekerjaan/serah terima barang, Surat Permintaan Pembayaran/SPP, Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta lampirannya;

- Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan lampirannya SPP-GU, SPP DU/TU, ABT Rutin, SPPLS;
- pembukuan bendahara meliputi Buku Kas Umum/BKU, Buku Kas Pembantu (BKP), buku/kartu pengawasan kredit anggaran, rekening koran bank;
- daftar gaji/kartu gaji;
- penggunaan dana Pemerintah Republik Indonesia untuk kontribusi/iuran pada badan atau organisasi internasional;
- dokumen penyertaan modal pemerintah;
- hutang negara;
- laporan arus kas meliputi, berita acara pemeriksaan kas/register penutupan kas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) termasuk Arsip Data Komputer (ADK), laporan pendapatan negara, Laporan Keadaan Kredit Kas (LKKA) bulanan/triwulan/semesteran;
- data rekening Bendahara Umum Negara (BUN).

02 Bantuan Keuangan/ Pinjaman Luar Negeri

Naskah dinas yang berkenaan dengan bantuan/pinjaman Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri, terdiri dari:

- alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri;
- aplikasi penarikan dana Bantuan Luar Negeri (BLN), lampirannya, *reimbursement*, *direct payment/transfer payment*, *special committment* atau *L/C Opening*, *special account/imprest fund*;
- otorisasi penarikan dana (*Payment Advice*);
- realisasi pencairan dana bantuan luar negeri yaitu, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya antara lain SPP, kontrak, berita acara dan data pendukung lainnya;
- *Replenishment* (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi, *No Objection Letter* (NOL), *Project*

Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE);

- *staff appraisal report;*
- report/laporan yang terdiri dari *progress report, monthly report, quarterly report;*
- laporan hutang negara, laporan pembayaran hutang negara, laporan posisi hutang negara;
- *completion report/annual report;*
- ketentuan/peraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri.

03 Pengelola APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

Naskah dinas yang berkenaan dengan Pengelola APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yaitu Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kuasa Pengguna Barang/Jasa (KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara penerimaan/pengeluaran, pengelola barang.

04 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Naskah dinas yang berkenaan dengan Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), antara lain:

- Manual Implementasi SAI;
- SAIBA, SIMAK, Persediaan, SAKTI, SPAN, e-Rekon, SIMFONI;
- Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
- Daftar Transaksi (DT), Pengeluaran (PK), Penerimaan (PN), Dokumen Sumber (DS), Bukti Jurnal (BJ), Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Giro 5 atau 8 (Giro 5/8), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM Dalam Daftar Ringkasan Pengembalian dan Potongan Dari Pengeluaran (SPDR), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);

- *Listing* (Daftar Rekaman Penerimaan) Buku Temuan dan Tindakan lain (SAI);
- Laporan Keuangan Semester dan Tahunan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan BMN Semester dan Tahunan;
- Laporan Realisasi Triwulan SAI Tingkat Kementerian, Tingkat Eselon I, Tingkat Wilayah dan Tingkat Satuan Kerja.

05 Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Naskah dinas yang berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara terdiri dari:

- laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
- hasil pengawasan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- hasil pengawasan dan pemeriksaan internal.
- laporan tindak lanjut/tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- dokumen penyelesaian keuangan negara, Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

PL PERLENGKAPAN

01 Barang Milik Negara (BMN)

01 Rencana Kebutuhan

Naskah dinas yang berkenaan dengan rencana kebutuhan BMN berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, persediaan, sarana komunikasi/informasi, *software*, prasarana fisik dan sarana penelitian.

02 Data BMN

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengumpulan dan pengklasifikasian data, *stock opname* BMN berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, *software*, persediaan, sarana komunikasi/informasi dan sarana penelitian.

03 Inventarisasi BMN

Naskah dinas yang berkenaan dengan inventarisasi BMN berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, persediaan, sarana komunikasi/informasi, *software*, prasarana fisik dan sarana penelitian.

04 Penghapusan BMN.

Naskah dinas yang berkenaan dengan penghapusan BMN berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, persediaan, sarana komunikasi/informasi, *software*, prasarana fisik dan sarana penelitian.

05 Penetapan BMN

Naskah dinas yang berkenaan dengan penetapan penggunaan BMN berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, persediaan, sarana komunikasi/informasi, *software*, prasarana fisik dan sarana penelitian.

06 Pengamanan BMN

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengamanan BMN yang meliputi penyimpanan, pengamanan, penyerahan dan pendistribusian BMN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

02 Kerumahtangaan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga dan kesehatan pegawai, antara lain:

- keamanan dan ketertiban;
- klinik kesehatan;
- tagihan listrik, telepon dan air;
- sanitasi;
- ruangan.

03 Pemeliharaan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pemeliharaan BMN dan perlengkapan rumah tangga, antara lain:

- gedung/bangunan;
- kendaraan dinas;
- halaman/taman;
- jaringan listrik/air/telpon.

04 Pengadaan Barang/Jasa

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi sampai dengan evaluasi pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

01 Pembinaan Pengadaan barang/Jasa

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembinaan kelembagaan, kompetensi dan sumber daya manusia bidang pengadaan barang dan jasa, antara lain:

- pengembangan kelembagaan pengadaan barang dan jasa;
- pelayanan hukum bagi personil pengadaan barang dan jasa;
- bimbingan/pelatihan/pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa;
- konsultasi/pendampingan pengadaan barang dan jasa;
- layanan informasi pengadaan barang/jasa;
- pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa.

02 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Naskah dinas yang berkenaan dengan persiapan pengadaan barang dan jasa, antara lain:

- strategi pengadaan;
- inventarisasi paket pengadaan;
- riset pasar;
- Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- penyusunan dan penetapan HPS;
- penyusunan dokumen pengadaan.

03 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Naskah dinas yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mulai dari pengumuman, pendaftaran, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran sampai dengan penetapan dan pengumuman pemenang, antara lain:

- pengadaan barang persediaan;
- pengadaan perlengkapan kantor;
- pengadaan tanah dan bangunan;
- pengadaan kendaraan;
- pengadaan instalasi /jaringan;
- pengadaan peralatan pencarian dan pertolongan.

04 Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa

Naskah dinas yang berkenaan dengan sistem informasi pengadaan barang dan jasa, antara lain:

- registrasi dan verifikasi akun;
- pengembangan sistem informasi;
- SIRUP;
- e-Monev;
- e-Katalog;
- SIKaP.

05 LPSE

Naskah dinas yang berkenaan dengan sistem teknis LPSE antara lain:

- dokumen pengajuan pembuatan akun;
- dokumen pakta integritas admin sistem;
- dokumen perubahan jadwal lelang;
- dokumen laporan admin sistem;
- dokumen *upgrade* dan perbaikan sistem.

ADM ADMINISTRASI

01 Kearsipan

01 Sistem Kearsipan

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan sampai dengan penetapan sistem kearsipan.

02 Pengelolaan Kearsipan

Naskah dinas yang berkenaan dengan ketatalaksanaan, pengolahan, penyimpanan, analisa nilai guna, pemindahan, penyerahan, pemusnahan, perawatan dan konservasi, pelacakan arsip, serta penyelamatan arsip vital.

03 Pengembangan Kearsipan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.

04 Sosialisasi Kearsipan

Naskah dinas yang berkenaan dengan sosialisasi dan pembinaan kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.

05 Bimbingan Kearsipan

Naskah dinas yang berkenaan dengan bimbingan dan penyuluhan kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.

06 Supervisi Kearsipan

Naskah dinas yang berkenaan dengan supervisi dan monitoring penyelenggaraan kearsipan mulai dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.

07 Audit Kearsipan

Naskah dinas yang berkenaan dengan audit penyelenggaraan kearsipan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan.

02 Persuratan

Naskah dinas yang berkenaan dengan urusan naskah dinas yang terdiri dari:

- pemberitahuan pindah kantor;
- penambahan nomor telepon;
- alamat pejabat;
- spesimen tanda tangan pejabat;
- cap dinas;
- penomoran;
- pengiriman;

- ekspedisi.

HM HUMAS

01 Publikasi dan Dokumentasi

01 Publikasi

Naskah dinas yang berkenaan dengan publikasi/penyebarluasan informasi, antara lain:

- publikasi media elektronik;
- media cetak;
- naskah berita;
- monitoring media;
- pengelolaan sosial media;
- poster;
- buletin;
- leaflet;
- booklet;
- brosur;
- kliping.

02 Dokumentasi

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/fakta kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media antara lain:

- kertas;
- foto;
- video;
- rekaman suara;
- multimedia serta tukar menukar dokumentasi.

03 Pameran

Naskah dinas yang berkenaan dengan pameran mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi dan laporan.

04 Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Naskah yang berkenaan dengan kegiatan layanan informasi publik dan pengaduan masyarakat.

02 Hubungan Media

Naskah yang berkenaan dengan segala kegiatan bidang kehumasan dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri, antara lain:

- Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas);
- konsultasi;
- *stake holder*;
- konferensi pers.

03 Protokol

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan protokoler pimpinan antara lain: kunjungan kerja pimpinan, penerimaan tamu pimpinan, rapat pimpinan, penyelenggaraan upacara dan pelantikan, agenda pimpinan serta konsumsi dan akomodasi.

HK HUKUM

01 Perundang-undangan

01 Produk Lembaga Tertinggi Negara

Naskah dinas yang berkenaan dengan produk hukum lembaga tinggi negara yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.

02 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Naskah dinas yang berkenaan dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.

03 Peraturan Pemerintah

Naskah dinas yang berkenaan dengan Peraturan Pemerintah yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.

- 04 Peraturan Presiden
Naskah dinas yang berkenaan dengan Peraturan Presiden yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.
- 05 Keputusan Presiden
Naskah dinas yang berkenaan dengan Keputusan Presiden yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.
- 06 Instruksi Presiden
Naskah dinas yang berkenaan dengan Instruksi Presiden yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.
- 07 Peraturan/Keputusan/Instruksi/Edaran Menteri/Kepala LPNK
Naskah dinas yang berkenaan dengan Peraturan/Keputusan/Instruksi/Edaran Menteri/Kepala LPNK yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.
- 08 Peraturan Pemerintah Daerah
Naskah dinas yang berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.
- 02 Perundang-Undangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- 01 Peraturan Kepala Badan
Naskah dinas yang berkenaan dengan Peraturan Kepala Badan yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.

- 02 Keputusan Kepala Badan
Naskah dinas yang berkenaan dengan Keputusan Kepala Badan yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.
- 03 Instruksi/Surat Edaran Kepala Badan
Naskah dinas yang berkenaan dengan Instruksi/Surat Edaran Kepala Badan yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.
- 04 Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Naskah dinas yang berkenaan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, penetapan, pengundangan sampai dengan salinan.
- 05 Instruksi/Surat Edaran Setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Naskah dinas yang berkenaan dengan Instruksi/Surat Edaran Setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, sampai dengan penetapan.
- 06 Peraturan/Keputusan Pejabat setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Naskah dinas yang berkenaan dengan Peraturan/Keputusan Setingkat Pejabat setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, sampai dengan penetapan.
- 07 Instruksi/Surat Edaran Pejabat setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Naskah dinas yang berkenaan dengan Instruksi/Surat Edaran Setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan

awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, sampai dengan penetapan.

08 Peraturan/Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan/Kepala Balai Diklat

Naskah dinas yang berkenaan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Kantor/Kepala Balai Diklat yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, sampai dengan penetapan.

09 Peraturan/Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Naskah dinas yang berkenaan dengan Peraturan/Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang meliputi surat pemrakarsa, naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, telaah hukum, sampai dengan penetapan.

03 Nota Kesepahaman/MoU/Perjanjian Kerja sama

Naskah dinas yang berkenaan dengan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama/*Letter of Intens* (LoI) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

04 Pidana

01 Pidana Masalah Kejahatan

Naskah dinas yang antara lain berkenaan dengan:

- kejahatan terhadap keamanan negara;
- pemalsuan surat;
- pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan kertas bank;
- penghinaan;
- penganiayaan;
- pencurian;
- penggelapan;
- penipuan/pemerasan dan pengancaman.

02 Pidana Masalah Pelanggaran

Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

- pelanggaran terhadap keselamatan umum bagi orang, barang, dan kesehatan;
- pelanggaran ketertiban umum;
- pelanggaran kesusilaan;
- pelanggaran asal usul dan perkawinan;
- pelanggaran jabatan.

05 Perdata

01 Perdata Masalah Orang

Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

- tempat tinggal/domisili;
- perwalian;
- akta catatan sipil;
- perkawinan.

02 Perdata Masalah Kebendaan

Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

- bezit dan hak-hak yang timbul karenanya;
- hak milik;
- hak numpang karang;
- hak usaha;
- hipotik;
- surat gadai.

03 Perdata Masalah Perikatan

Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

- kontrak;
- jual-beli;
- sewa-menyewa;
- pemberian kuasa;
- hibah.

04 Perdata Masalah Pembuktian

Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

- bukti kepemilikan;
- surat keterangan.

05 Peradilan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara (TUN)

Naskah yang antara lain berkenaan dengan :

- somasi;
- keputusan Peradilan Tata Usaha Negara;
- keputusan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Mahkamah Agung (MA).

06 Dokumentasi dan Informasi Hukum

01 Dokumentasi Perundang-undangan

- Produk lembaga tinggi negara;
- Undang-undang/ Perppu;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Keputusan Presiden;
- Instruksi Presiden;
- Peraturan/Keputusan/Instruksi/Edaran Menteri/Kepala LPNK;
- Peraturan Pemerintah Daerah.

02 Dokumentasi Produk Hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- Peraturan Kepala Badan;
- Keputusan Kepala Badan;
- Instruksi/Surat Edaran Kepala Badan;
- Peraturan/Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- Instruksi/Surat Edaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Kepala Kantor/Kepala Balai Diklat;
- Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran KPA.

07 Bantuan Hukum

01 Pengadilan Agama

Naskah yang berkenaan dengan bantuan hukum kepada pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kasus yang berkaitan dengan Pengadilan Agama.

02 Kasus Hukum Pidana

Naskah yang menyangkut bantuan hukum kepada pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kasus pidana yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan program termasuk proses penelaahan hukum yang terkait.

03 Kasus Hukum Perdata

Menyangkut bantuan hukum kepada pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kasus perdata yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan program termasuk proses penelaahan hukum yang terkait.

04 Penelaahan Hukum

Naskah yang berkenaan dengan aspek hukum dalam pembuatan surat keputusan, kontrak perjanjian, serta pembuatan peraturan perundang-undangan.

08 Kekayaan Intelektual

01 Hak Cipta;

02 Hak Paten;

03 Hak Desain Industri;

04 Hak Rahasia Dagang;

05 Hak Merk;

06 Desain Tata Letak.

KP KEPEGAWAIAN

01 Perencanaan Pegawai

01 Formasi

Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan kebutuhan pegawai dari unit kerja, usulan permintaan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, persetujuan, penetapan formasi, sampai dengan penetapan formasi khusus.

02 Pengadaan Pegawai

Naskah dinas yang berkenaan dengan proses penerimaan pegawai antara lain:

- pengumuman;
- seleksi administrasi;
- pemanggilan peserta tes;
- pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD);
- pelaksanaan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB);
- penetapan pengumuman kelulusan;
- berkas lamaran yang tidak diterima.

03 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honorer

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan termasuk tenaga honorer antara lain:

- nota usul pengangkatan;
- Surat Keputusan CPNS/PNS termasuk Tenaga Honorer;
- Berita Acara Sumpah PNS.

02 Pengembangan Pegawai

01 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi mulai dari perencanaan (Pemetaan/*Talent Mapping* Pegawai) pelaksanaan *assesment* pegawai, pelaporan serta evaluasi.

02 Pembinaan Mental

Naskah yang berkenaan dengan:

- pembinaan mental pegawai termasuk kerohanian;
- konsultasi psikologi dan terapi.

03 Ujian Dinas

Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ujian dinas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

04 Ijin Belajar

Naskah yang berkenaan dengan pengajuan ijin belajar antara lain:

- permohonan Ijin Belajar;
- penetapan Surat Ijin Belajar, dsb.

05 Penyesuaian Ijazah

Naskah yang berkenaan dengan penyesuaian ijazah antara lain:

- pelaksanaan ujian Penyesuaian Ijazah dari perencanaan, penetapan pokja, pengumuman, seleksi, penetapan hasil ujian;
- pengajuan penyesuaian ijazah ke BKN;
- penetapan Pencantuman Gelar.

06 Kursus/Magang

Naskah dinas yang berkenaan kursus/magang mulai dari perencanaan, pendataan peserta, pelaksanaan serta evaluasi dan penerbitan surat keterangan.

03 Mutasi Pegawai

01 Alih Tugas

Naskah dinas yang berkenaan dengan mutasi pegawai antara lain:

- mutasi antar instansi mulai dari permohonan mutasi, nota persetujuan/pertimbangan Badan Kepegawaian Negara dan penetapan alih tugas pegawai;
- mutasi unit kerja mulai dari permohonan mutasi sampai dengan penetapan mutasi antar unit kerja;
- mutasi jabatan mulai dari permohonan mutasi sampai dengan penetapan mutasi unit kerja;

- diperbantukan;
- ditugaskan;
- dipekerjakan;
- alih status kepegawaian.

02 Mutasi Keluarga

Naskah dinas yang berkenaan dengan mutasi keluarga pegawai meliputi:

- surat ijin pernikahan/perceraian;
- surat penolakan ijin pernikahan/perceraian;
- surat nikah/cerai;
- akta kelahiran anak;
- surat keterangan meninggal dunia.

03 Kenaikan Gaji Berkala

Naskah dinas yang berkenaan dengan kenaikan gaji berkala mulai dari pendataan sampai dengan penetapan.

04 Penyesuaian Masa Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.

05 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan

Naskah yang berkenaan dengan kenaikan pangkat/golongan/jabatan antara lain:

- kenaikan pangkat/golongan mulai dari pendataan, pengumpulan berkas, verifikasi, penginputan ke dalam sistem aplikasi kepegawaian BKN, sampai dengan penetapan kenaikan pangkat;
- kenaikan jabatan mulai dari penetapan kenaikan jabatan, Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Perintah Menduduki Jabatan (SPMJ).

06 Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural

Naskah dinas yang berkenaan dengan proses pertimbangan jabatan dan pangkat antara lain:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman;
- c. seleksi;
- d. penetapan surat pengangkatan, pemberhentian;

- e. penetapan berita acara, Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), SPMT dan SPMJ.

07 Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional

Naskah yang berkenaan dengan proses pengangkatan pegawai ke dalam jabatan fungsional antara lain:

- penetapan dalam jabatan fungsional;
- berita acara sumpah;
- SPMT;
- SPMJ.

04 Penilaian dan Disiplin

01 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Naskah dinas yang berkenaan dengan usul dan penetapan penilaian prestasi kerja pegawai.

02 Penetapan Angka Kredit

Naskah dinas yang berkenaan dengan usul, penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu.

03 Disiplin Pegawai

Naskah dinas yang berkenaan dengan hukuman disiplin pegawai antara lain:

- daftar hadir;
- rekapitulasi daftar hadir;
- penggunaan seragam dinas;
- catatan pelanggaran;
- hukuman disiplin ringan;
- hukuman disiplin sedang;
- hukuman disiplin berat.

04 Penyelesaian Keberatan Pegawai

Naskah dinas yang berkenaan dengan usul dan penetapan penyelesaian keberatan pegawai.

05 Cuti

01 Cuti Besar

Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan sampai dengan penetapan cuti besar.

02 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan

Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan sampai dengan penetapan cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan.

03 Cuti Alasan Penting

Naskah dinas yang berkenaan dengan usulan sampai dengan penetapan cuti alasan penting.

04 Cuti Diluar Tanggungan Negara

Naskah dinas yang berkenaan dengan usul sampai dengan penetapan cuti diluar tanggungan negara.

06 Administrasi Kepegawaian

01 Dokumentasi Identitas Pegawai

Naskah dinas yang berkenaan dengan identitas pegawai antara lain:

- pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG);
- kartu istri/kartu suami;
- Bukti Diri/NIP;
- keanggotaan organisasi profesi kedinasan;
- keanggotaan parpol/ormas/LSM;
- Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P).

02 Data Kepegawaian

Naskah yang berkenaan dengan data kepegawaian antara lain:

- Daftar Urutan Kepangkatan (DUK);
- *personal file*/berkas perorangan pegawai;
- daftar nominatif pegawai;
- Daftar Riwayat Hidup (DRH).

03 Pendelegasian Wewenang

Naskah yang berkenaan dengan pendelagasian wewenang antara lain:

- Surat Perintah Pelaksana Harian (PH) yaitu, Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).

- Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt), yaitu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.

07 Kesejahteraan Pegawai

01 Tunjangan Keluarga

Naskah yang berkenaan dengan tunjangan keluarga dan penyesuaian tunjangan keluarga.

02 Tunjangan Kebutuhan Pokok

Naskah yang berkenaan dengan pemberian kebutuhan pokok (misal : beras, gula, terigu).

03 Tunjangan Jabatan

Naskah yang berkenaan dengan tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional mulai dari pengusulan sampai dengan penetapan.

04 Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (TRT)

Naskah yang berkenaan dengan Tunjangan Risiko Bahaya Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (TRT) mulai dari pengusulan, penilaian sampai dengan penetapan.

05 Tunjangan Kinerja

Naskah yang berkenaan dengan tunjangan kinerja mulai dari pengusulan sampai dengan penetapan, mutasi tunjangan kinerja, penghentian tunjangan kinerja.

06 Asuransi Kesehatan

Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen);
- pemeriksaan kesehatan pejabat/pegawai;
- donor darah.

07 Penghargaan

Naskah yang berkenaan dengan pemberian penghargaan/piagam (Bintang, Satyalancana dan sejenisnya) mulai dari surat usulan sampai dengan penetapan dan penyerahan.

08 Perumahan

Naskah yang berkenaan dengan perumahan pegawai, antara lain Bapetarum dan Taperum.

09 Bantuan Sosial

Naskah yang antara lain berkenaan dengan:

- pemberian bantuan/tunjangan kepada pegawai dan keluarga yang mengalami musibah termasuk kepada pihak lain;
- penyelenggaraan khitanan massal atau kegiatan sosial lain.

10 Angkutan Pegawai

Naskah yang berkenaan dengan angkutan pegawai termasuk kendaraan untuk evakuasi pegawai dan peminjaman kendaraan dinas untuk rekreasi dan kegiatan sosial.

11 Konsumsi

Naskah yang berkenaan dengan pengadaan makan siang pegawai termasuk makanan tambahan (kudapan) mulai dari pendanaan sampai dengan pelaksanaannya.

08 Pemberhentian Pegawai

01 Dengan Hormat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pensiun termasuk di dalamnya pensiun/duda/janda/anak dan Taspen.

02 Tidak Dengan Hormat

Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya SK pemberhentian.

03 Pemberhentian Dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda/PNS Yang Tewas.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/Janda/Duda/PNS yang tewas.

04 Meninggal Dunia

Naskah dinas yang berkenaan dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia mulai dari pengajuan/pemberitahuan sampai dengan dikeluarkan Surat Keputusan.

09 Organisasi Non Kedinasan

01 KORPRI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

02 Dharma Wanita

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma Wanita Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

03 Koperasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

DL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

01 Pelatihan

01 Pra Jabatan

Naskah dinas yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan Pra Jabatan.

02 Penjurangan Jabatan Struktural

Naskah yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan jenjang jabatan struktural

pegawai mulai dari seleksi, pelaksanaan sampai dengan evaluasi antara lain:

- Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I;
- Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II;
- Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III;
- Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV.

03 Penjenjangan Jabatan Fungsional

Naskah yang berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi dalam rangka peningkatan jenjang jabatan fungsional pegawai.

04 Bimbingan Teknis

Naskah yang berkenaan dengan penyelenggaraan bimbingan teknis mulai dari penawaran, peserta, penyelenggaraan, pelaporan dan evaluasi.

02 Kebutuhan Diklat

01 Analisa Diklat

Naskah dinas yang berkenaan dengan analisa kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia baik diklat substantif maupun fasilitatif.

02 Kurikulum dan Silabus

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyusunan kurikulum dan silabus diklat mulai dari pembahasan sampai dengan penetapan.

03 Pengembangan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

04 Evaluasi Diklat

Naskah dinas yang berkenaan dengan kegiatan evaluasi pasca diklat mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan.

03 Penyelenggaraan Diklat

01 Diklat Substantif

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan diklat substantif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan antara lain:

- penentuan peserta, surat pemanggilan peserta;

- surat keputusan tim penyelenggaraan diklat;
- surat keputusan tim pengajar diklat;
- sarana dan prasarana diklat;
- jadwal;
- panduan diklat;
- laporan panitia penyelenggara diklat;
- sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat;
- daftar peserta diklat;
- bahan ajar diklat;
- daftar hadir peserta diklat;
- daftar hadir widyaiswara;
- hasil formulasi evaluasi penyelenggaraan diklat;
- sertifikasi/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL);
- sambutan penutupan diklat.

02 Diklat Fasilitatif

Naskah dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan diklat fasilitatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan antara lain:

- penentuan peserta, surat pemanggilan peserta;
- surat keputusan tim penyelenggaraan diklat;
- surat keputusan tim pengajar diklat;
- jadwal;
- panduan diklat;
- laporan panitia penyelenggara diklat;
- sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat;
- daftar peserta diklat;
- bahan ajar diklat;
- daftar hadir peserta diklat;
- daftar hadir widyaiswara;
- hasil formulasi evaluasi penyelenggaraan diklat;
- sertifikasi/STTPL;
- sambutan penutupan diklat.

04 Pendidikan

01 Program Diploma

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma baik beasiswa maupun ikatan dinas atau penawaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Diploma.

02 Program Sarjana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana baik beasiswa maupun ikatan dinas atau penawaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Sarjana.

03 Program Pasca Sarjana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pasca sarjana baik beasiswa maupun ikatan dinas atau penawaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Pasca Sarjana.

04 Program Doktor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan doktor baik beasiswa maupun ikatan dinas atau penawaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Doktor.

OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

01 Organisasi

01 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan serta evaluasi organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

02 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan serta evaluasi organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) contoh Kantor Pencarian dan Pertolongan dan Balai Pendidikan dan Pelatihan.

03 Balai Pendidikan dan Pelatihan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan serta evaluasi organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) contoh Kantor

Pencarian dan Pertolongan dan Balai Pendidikan dan Pelatihan.

04 Pos Pencarian dan Pertolongan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan serta evaluasi organisasi Pos Pencarian dan Pertolongan.

05 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan

Naskah dinas yang berkenaan dengan pembentukan, perubahan dan/atau penyempurnaan serta evaluasi organisasi Pos Pencarian dan Pertolongan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

02 Analisis Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan informasi jabatan, uraian tugas, dan spesifikasi atau persyaratan jabatan antara lain:

- analisis jabatan struktural (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas);
- analisis jabatan fungsional;
- analisis jabatan pelaksana.

03 Standar Kompetensi

01 Standar Kompetensi Jabatan Struktural

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan struktural.

02 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan fungsional.

04 Analisis Beban Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengukuran beban kerja jabatan dan unit kerja serta pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja.

05 Nomenklatur Jabatan

Naskah-naskah yang berkenaan dengan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi nomenklatur jabatan (uraian tugas).

06 Tata Laksana

01 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan serta evaluasi pedoman mutu dan prosedur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:

- SOP teknis;
- SOP administratif;
- sistem mekanisme kerja.

02 Proses Bisnis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan, penyelerasan dan evaluasi proses bisnis.

03 Pembakuan Sarana Kerja

Naskah yang berkenaan dengan pembakuan sarana kerja, antara lain:

- logo, lambang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- seragam kerja.

07 Reformasi Birokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

08 Evaluasi Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

PS PENGAWASAN

01 Kebijakan Pengawasan

01 Perencanaan pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengawasan mulai dari penyusunan, penetapan sampai dengan pemantauan rencana dan program pengawasan.

02 Kerjasama pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama pengawasan mulai dari penyusunan sampai dengan penetapan kerja sama pengawasan.

03 Laporan hasil pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan semesteran dan tahunan baik yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPKP dan UKP4 serta tanggapan atas Laporan Pemeriksaan BPK-RI.

02 Audit

01 Audit Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja yang meliputi rencana kegiatan audit, surat menyurat, surat penugasan, pelaksanaan audit sampai dengan laporan hasil audit.

02 Audit Keuangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit keuangan yang meliputi rencana kegiatan audit, surat menyurat, surat penugasan, pelaksanaan audit sampai dengan laporan hasil audit.

03 Audit Dengan Tujuan Tertentu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan khusus, gratifikasi dan benturan kepentingan yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat menyurat, surat penugasan audit sampai dengan laporan.

04 Audit BMN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit BMN dan Hibah yang meliputi rencana kegiatan audit, surat menyurat, surat penugasan, pelaksanaan audit sampai dengan laporan hasil audit.

05 Reviu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu yang meliputi rencana kegiatan reviu, surat menyurat, surat penugasan, pelaksanaan reviu sampai dengan laporan hasil reviu.

- 06 Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi yang meliputi rencana kegiatan evaluasi, surat menyurat, surat penugasan, pelaksanaan evaluasi sampai dengan laporan hasil evaluasi.
- 07 Pendampingan/konseling

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan yang meliputi rencana kegiatan, surat menyurat, surat penugasan, pelaksanaan pendampingan sampai dengan laporan hasil pendampingan.
- 03 Pemantauan Tindaklanjut
 - 01 Tindaklanjut Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atau LHP lainnya yang ditindaklanjuti sampai dengan pelaporan.
 - 02 Tindaklanjut Pengawasan APIP

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti sampai dengan pelaporan.
 - 03 Sistem Informasi Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem informasi Pengawasan APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan sampai dengan pelaporan.
- 04 Pengawasan Melekat
 - 01 Pengaduan APIP

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat maupun dari pegawai perihal kode etik APIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - 02 *Whistle Blowing System* (WBS)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat/pegawai dari internal maupun eksternal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berkaitan dengan tindakan unsur pidana sebagai upaya melindungi pelapor dan kegiatan lain yang berkaitan dengan WBS.

- 03 Pengendalian Gratifikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaporan gratifikasi dari pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- 05 Sistem Pengendalian Intern
- 01 Pembinaan Anti Korupsi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan anti korupsi antara lain:
- sosialisasi anti korupsi dan kampanye anti korupsi;
 - program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) penilaian WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - zona integritas;
 - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - pemantauan kegiatan anti korupsi sampai dengan pelaporan; dan
 - Saber pungli (sapu bersih pungutan liar).
- 02 Penguatan Pengawasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan pengawasan seminar, sosialisasi, *workshop* dan pemantauan sampai dengan pelaporan.
- 03 Pembinaan Reformasi Birokrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan reformasi birokrasi antara lain mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

DI DATA DAN INFORMASI

01 Pelayanan Informasi

01 Pengumpulan Data

Naskah yang berkenaan dengan pengumpulan data, antara lain:

- dokumen persiapan pengumpulan data;
- dokumen pelaksanaan pengumpulan data;
- dokumen survei indeks kepuasan masyarakat.

02 Pengolahan Data

Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pengolahan data, antara lain:

- dokumen persiapan pengolahan data;
- dokumen pelaksanaan pengolahan data;
- dokumen hasil pengolahan data.

02 Penyajian Data

Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyajian data, antara lain:

- penyajian data statistik;
- penyajian data non statistik.

03 Penyajian Informasi

Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyajian informasi, antara lain:

- Penyajian informasi gambar;
- Penyajian informasi gambar bergerak;
- Penyajian informasi pengelolaan konten *website*.

02 Sistem Informasi

01 Teknologi Informasi

Naskah yang berkenaan dengan pengelolaan teknologi informasi meliputi aplikasi, jaringan, *website* dan pengelolaan informasi.

02 Rancangan Teknologi Informasi

Naskah yang berkenaan dengan kegiatan perencanaan pembangunan atau pengembangan teknologi informasi, antara lain:

- dokumen perencanaan pembuatan aplikasi;
- dokumen perencanaan pemabungan insfrastruktur;
- dokumen penyusunan *road map* Teknologi Informasi.

03 Inventarisasi Teknologi Informasi

Naskah yang berkenaan dengan inventarisasi aplikasi dan jaringan, antara lain:

- rencana inventarisasi;
- inventarisasi perangkat keras;
- inventarisasi perangkat lunak;
- evaluasi inventarisasi.

04 Pemeliharaan Teknologi Informasi

Naskah yang berkenaan dengan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:

- rencana pemeliharaan aplikasi dan jaringan;
- laporan kerusakan aplikasi dan jaringan;
- pemeliharaan jaringan;
- pemeliharaan aplikasi;
- evaluasi pelaksanaan pemeliharaan.

05 *Monitoring* Teknologi Informasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan *monitoring* teknologi informasi, antara lain:

- rencana *monitoring* aplikasi dan jaringan;
- *monitoring* jaringan;
- *monitoring* aplikasi;

06 Lisensi

Naskah yang berkaitan dengan lisensi teknologi informasi, antara lain:

- lisensi perangkat keras;
- lisensi perangkat lunak;
- permohonan lisensi.

07 Sewa Layanan

Naskah yang berkenaan dengan kegiatan sewa layanan teknologi informasi, antara lain :

- sewa layanan *bandwitch*;
- sewa layanan *website*;
- sewa layanan domain.

B. FUNGSI SUBSTANTIF

OPS OPERASI

01 Perencanaan dan Standardisasi Operasi

01 Rencana dan Pengembangan Operasi

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana, dan pengembangan, serta pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan, antara lain:

- rencana nasional pencarian dan pertolongan;
- rencana kontingensi;

- analisa di bidang operasi (pengembangan operasi, pengerahan potensi dan pengendalian operasi, dukungan operasi);
- *monitoring* dan evaluasi di bidang operasi (pengembangan operasi, pengerahan potensi dan pengendalian operasi, dukungan operasi).

02 Standardisasi Operasi

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebutuhan di bidang operasi pencarian dan pertolongan, antara lain:

- peraturan dibidang operasi pencarian dan pertolongan;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait operasi pencarian dan pertolongan;
- petunjuk pelaksanaan di bidang operasi pencarian dan pertolongan;
- petunjuk teknis di bidang operasi pencarian dan pertolongan;
- standar kebutuhan di bidang operasi pencarian dan pertolongan.

02 Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi

01 Kecelakaan Kapal

Naskah yang berkenaan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, permintaan dan pengerahan potensi pencarian dan pertolongan, pengendalian operasi pencarian dan pertolongan, pelayanan informasi, kerja sama dan bantuan, penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis serta asistensi operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal, antara lain:

- berita SAR kecelakaan kapal;
- laporan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal (berita SAR, *precom/excom*, format *briefing/debriefing*, rencana operasi, bagan/struktur, surat perintah, peta operasi pencarian, dokumentasi operasi);

- laporan asistensi operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal;
- uji fungsi dan uji kompetensi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal;
- rapat koordinasi dan rapat kerja teknis operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal.

02 Kecelakaan Pesawat Udara

Naskah yang berkenaan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, permintaan dan pengerahan potensi pencarian dan pertolongan, pengendalian operasi pencarian dan pertolongan, pelayanan informasi, kerja sama dan bantuan, penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis serta asistensi operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara, antara lain:

- berita SAR kecelakaan pesawat udara;
- laporan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara (berita SAR, *precom/excom*, format *briefing/debriefing*, rencana operasi, bagan/struktur, surat perintah, peta operasi pencarian, dokumentasi operasi);
- laporan asistensi operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara;
- uji fungsi dan uji kompetensi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara.
- rapat koordinasi dan rapat kerja teknis operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal.

03 Kecelakaan Dengan Penanganan Khusus

Naskah yang berkenaan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, permintaan dan pengerahan potensi pencarian dan pertolongan, pengendalian operasi pencarian dan pertolongan, pelayanan informasi, kerja sama dan bantuan, penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis serta asistensi operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan dengan penanganan khusus, antara lain:

- berita SAR kecelakaan dengan penanganan khusus;
- laporan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus (berita SAR, *precom/excom*, format *briefing/debriefing*, rencana operasi, bagan/struktur, surat perintah, peta operasi pencarian, dokumentasi operasi);
- laporan asistensi operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus;
- uji fungsi dan uji kompetensi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus;
- rapat koordinasi dan rapat kerja teknis operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dengan penanganan khusus.

04 Bencana

Naskah yang berkenaan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, permintaan dan pengerahan potensi pencarian dan pertolongan, pengendalian operasi pencarian dan pertolongan, pelayanan informasi, kerja sama dan bantuan, penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis serta asistensi operasi pencarian dan pertolongan terhadap Bencana, antara lain:

- berita SAR bencana;
- laporan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada bencana (berita SAR, *precom/excom*, format *briefing/debriefing*, rencana operasi, bagan/struktur, surat perintah, peta operasi pencarian, dokumentasi operasi);
- laporan asistensi operasi pencarian dan pertolongan pada bencana;
- uji fungsi dan uji kompetensi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada bencana.
- rapat koordinasi dan rapat kerja teknis operasi pencarian dan pertolongan pada bencana;
- *assesment* INSARAG.

05 Kondisi Membahayakan Manusia

Naskah yang berkenaan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, permintaan dan pengerahan potensi pencarian dan pertolongan, pengendalian operasi pencarian dan pertolongan, pelayanan informasi, kerja sama dan bantuan, penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis serta asistensi operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, antara lain:

- berita SAR kondisi membahayakan manusia;
- laporan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kondisi membahayakan manusia (berita SAR, *precom/excom*, format *briefing/debriefing*, rencana operasi, bagan/struktur, surat perintah, peta operasi pencarian, dokumentasi operasi);
- laporan asistensi operasi pencarian dan pertolongan pada kondisi membahayakan manusia;
- uji fungsi dan uji kompetensi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kondisi membahayakan manusia.
- rapat koordinasi dan rapat kerja teknis operasi pencarian dan pertolongan pada kondisi membahayakan manusia.

03 Dukungan Operasi

01 Penatausahaan Dukungan Operasi

Naskah yang berkenaan dengan administrasi, verifikasi biaya, dan penyusunan laporan serta pendokumentasian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, antara lain:

- dokumen penggantian biaya operasi;
- laporan verifikasi biaya operasi;
- surat perintah asistensi operasi.

02 Pelaksanaan Dukungan Operasi

Naskah yang berkenaan dengan penyiapan prosedur perijinan dan/atau rekomendasi, penyiapan dukungan sarana, logistik, dan perbekalan operasi pencarian dan pertolongan, antara lain:

- *security clearance*;
- berita SAR pergerakan sarana operasi;
- permohonan logistik dan perbekalan operasi;
- permohonan dukungan operasi (surat rekomendasi, surat pengantar pendukung operasi);
- pendokumentasian naskah dinas di bidang operasi.

KSG KESIAPSIAGAAN

01 Perencanaan dan Standardisasi Siaga dan Latihan

01 Rencana dan Pengembangan Siaga dan Latihan

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana, dan pengembangan, serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang siaga dan latihan, antara lain:

- laporan analisis siaga;
- laporan analisis latihan;
- laporan evaluasi siaga;
- laporan evaluasi latihan.

02 Standardisasi Siaga dan Latihan

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebutuhan di bidang siaga dan latihan, antara lain:

- peraturan terkait siaga;
- peraturan terkait latihan;
- peraturan terkait fasilitas siaga dan latihan;
- SOP siaga;
- SOP latihan;
- SOP fasilitas siaga dan latihan.

02 Siaga dan Latihan

01 Siaga

Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi, pelaksanaan siaga serta pengoperasian fasilitas siaga, antara lain:

a. siaga rutin

naskah yang terkait siaga rutin antara lain:

- surat perintah siaga;
- berita SAR;
- penunjukan SAR Mission Coordinator (SMC);
- dokumen serah terima siaga (Laporan/paparan petugas siaga antara lain Kagahar, Operator Komunikasi, *Rescuer*);
- dokumen pengecekan peralatan SAR;
- daftar hadir;
- jurnal petugas siaga.

b. siaga khusus

naskah yang terkait siaga khusus antara lain:

- surat perintah siaga;
- dokumen serah terima siaga khusus (Laporan petugas siaga contoh: Kagahar, Operator Komunikasi, *Rescuer*);
- dokumen pengecekan peralatan SAR;
- daftar hadir;
- jurnal petugas siaga;
- laporan koordinasi dengan instansi/organisasi berpotensi.

02 Latihan

Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi, pelaksanaan latihan serta pengoperasian fasilitas latihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi, antara lain:

- latihan SAR gabungan;
- latihan SAR bersama;
- latihan SAR antar tim;

- latihan SAR tim;
- latihan SAR perorangan;
- asistensi latihan SAR.

03 Pengelolaan Fasilitas Siaga dan Latihan

Naskah yang berkenaan dengan perawatan dan penyimpanan fasilitas di bidang siaga dan latihan, antara lain:

- laporan inventaris fasilitas siaga dan latihan;
- laporan perawatan fasilitas siaga dan latihan;
- dokumen peminjaman fasilitas siaga dan latihan.

KOM SISTEM KOMUNIKASI

01 Perencanaan dan Standardisasi

01 Rencana dan pengembangan komunikasi

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana dan pengembangan, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang sistem komunikasi serta penyusunan rencana penempatan perangkat komunikasi, antara lain:

- rencana pengembangan sistem komunikasi;
- pemantauan sistem komunikasi;
- evaluasi sistem komunikasi;
- optimalisasi sistem komunikasi;
- revitalisasi sistem komunikasi.

02 Standardisasi komunikasi

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi serta penyusunan spesifikasi teknis perangkat dan peralatan komunikasi, antara lain:

- peraturan terkait sistem komunikasi;
- peraturan latihan/ gelar komunikasi;
- SOP sistem komunikasi.

02 Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi

01 Dukungan Komunikasi

Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem komunikasi, bimbingan teknis, familiarisasi, dan pengelolaan perangkat dan peralatan komunikasi, gelar

dan uji komunikasi, serta koordinasi dan penyiapan dukungan komunikasi, antara lain:

- bimbingan teknis komunikasi;
- familiarisasi peralatan komunikasi;
- personil komunikasi;
- pemasangan peralatan, perangkat dan jaringan komunikasi;
- uji fungsi alat komunikasi.

02 Sertifikasi Pemancar Sinyal Marabahaya

Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi dan validasi alat pemancar sinyal marabahaya, antara lain:

- Registrasi *beacon* (ELT/EPIRB/PLB);
- Surat keterangan uji fungsi.

03 Inventarisasi dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi

01 Inventarisasi peralatan komunikasi

Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan perangkat dan peralatan komunikasi, antara lain:

- inventarisasi peralatan komunikasi;
- alat deteksi dini;
- inventarisasi peralatan dekteksi dini.

02 Pemeliharaan Sistem Komunikasi

Naskah yang berkenaan dengan penyiapan pelaksanaan pemeliharaan perangkat dan peralatan komunikasi, penyusunan rencana dan program, serta kegiatan pemeliharaan sistem komunikasi, antara lain:

- pemeliharaan sistem komunikasi;
- pemeliharaan deteksi dini;
- pemeliharaan jaringan komunikasi;
- pemeliharaan alat komunikasi;
- sewa *tower*;
- Ijin Stasiun Radio (ISR).

SP SARANA DAN PRASARANA

01 Perencanaan dan Standardisasi Sarana Prasarana

01 Rencana dan Pengembangan Sarana Prasarana

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana dan pengembangan, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana serta penyusunan rencana penempatan sarana, antara lain:

- penawaran/pengenalan/presentasi peralatan;
- rencana kebutuhan sarana prasarana;
- analisis kebutuhan dan pengembangan sarana prasarana (TOR/RAB/RKA);
- rencana penempatan sarana prasarana;
- evaluasi sarana prasarana (LAKIP sarana prasarana/pemantauan rencana aksi);
- pemantauan sarana prasarana.

02 Standardisasi Sarana Prasarana

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana, spesifikasi teknis sarana dan prasarana, antara lain:

- peraturan terkait sarana prasarana;
- peraturan terkait standardisasi sarana prasarana;
- SOP terkait sarana dan prasarana;
- spesifikasi teknis sarana dan prasarana.

02 Dukungan Sarana Prasarana

01 Dukungan Perbekalan

Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan penyiapan dukungan peralatan pencarian dan pertolongan dan perbekalan, antara lain:

- Penerimaan peralatan pencarian dan pertolongan dan perbekalan;
- Permintaan peralatan pencarian dan pertolongan dan perbekalan;
- Pengeluaran peralatan pencarian dan pertolongan dan perbekalan;

- Pengajuan usulan penghapusan peralatan pencarian dan pertolongan dan perbekalan;
- *Stock opname* peralatan pencarian dan pertolongan dan perbekalan.

02 Dukungan Sarana Prasarana

Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan koordinasi serta penyiapan dukungan sarana dan prasarana, antara lain:

- Penerimaan sarana prasarana;
- Permintaan sarana prasarana;
- Pengeluaran sarana prasarana;
- Pengajuan usulan penghapusan sarana prasarana;
- Familiarisasi Peralatan.

03 Pemeliharaan Sarana Prasarana

01 Pemeliharaan Sarana Laut

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana dan program pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan pemantauan, evaluasi dan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana laut, antara lain:

- dokumen perencanaan pemeliharaan sarana laut;
- dokumen inventarisasi sarana laut;
- laporan penggunaan sarana laut;
- laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana laut;
- laporan pemantauan dan pengawasan pemeliharaan sarana laut;
- laporan evaluasi pemeliharaan sarana laut.

02 Pemeliharaan Sarana Darat

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana dan program pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan pemantauan, penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana darat, antara lain:

- dokumen perencanaan pemeliharaan sarana darat;
- dokumen inventarisasi sarana darat;
- laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana darat;
- laporan pemantauan dan pengawasan pemeliharaan sarana darat;

- laporan evaluasi pemeliharaan sarana darat;
- laporan pemakaian sarana darat.

03 Pemeliharaan Sarana Udara

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana dan program pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan pemantauan, penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana udara, antara lain:

- dokumen perencanaan pemeliharaan sarana udara;
- laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana udara;
- laporan pemantauan dan pengawasan pemeliharaan sarana udara;
- laporan evaluasi pemeliharaan sarana udara;
- permintaan dukungan suku cadang sarana udara;
- permintaan dukungan bahan bakar minyak sarana udara.

04 Peralatan Pencarian dan Pertolongan

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana dan program pemeliharaan, pelaksanaan pemeliharaan, dan pemantauan, penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi sarana dan peralatan pencarian dan pertolongan, antara lain:

- dokumen perencanaan pemeliharaan peralatan pencarian dan pertolongan;
- laporan pelaksanaan pemeliharaan peralatan pencarian dan pertolongan;
- laporan pemantauan dan pengawasan pemeliharaan peralatan pencarian dan pertolongan;
- laporan evaluasi pemeliharaan peralatan pencarian dan pertolongan.

BNG BINA TENAGA

01 Perencanaan dan Standardisasi Tenaga

01 Rencana dan Pengembangan Tenaga

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan rencana dan pengembangan, penyusunan bahan pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina tenaga, serta penyusunan rencana dan program

pemeliharaan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan, antara lain:

- laporan perencanaan pengembangan kompetensi tenaga;
- laporan analisis kompetensi tenaga;
- laporan analisis kebutuhan diklat teknis tenaga;
- laporan evaluasi kompetensi tenaga.

02 Standardisasi Tenaga

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi bidang bina tenaga, rancang bangun kurikulum dan silabus, materi bahan ajar pendidikan dan pelatihan teknis bidang pencarian dan pertolongan, antara lain:

- peraturan terkait kompetensi tenaga;
- peraturan terkait penyelenggaraan diklat teknis;
- silabus dan kurikulum diklat tenaga;
- bahan ajar pendidikan dan pelatihan teknis tenaga;
- SOP pendidikan dan pelatihan tenaga;
- pemantauan pelaksanaan diklat teknis tenaga;
- Peraturan terkait politeknik bidang pencarian dan pertolongan.

02 Pengelolaan Tenaga

01 Penyiapan Tenaga

Naskah yang berkenaan dengan pembinaan, penyiapan materi dan pelaksanaan pemeliharaan kompetensi, pemantauan, penilaian, dan evaluasi pembinaan serta penyusunan dan pengelolaan *database* tenaga pencarian dan pertolongan, antara lain:

- laporan pembinaan tenaga;
- laporan evaluasi pembinaan tenaga;
- *database* tenaga pencarian dan pertolongan;
- pengawakan sarana SAR.

02 Sertifikasi Tenaga

Naskah yang berkenaan dengan pembinaan penyusunan materi dan pelaksanaan uji kompetensi, serta pelaksanaan sertifikasi tenaga pencarian dan pertolongan dan jabatan fungsional bidang pencarian dan pertolongan, antara lain:

- sertifikasi tenaga;
- uji kompetensi;
- sertifikat uji kompetensi;
- lembaga sertifikasi profesi.

03 Pembinaan Jabatan Fungsional

Naskah yang berkenaan dengan pembinaan, penyusunan dan pengelolaan *database* serta administrasi jabatan fungsional bidang pencarian dan pertolongan, antara lain:

- bimbingan teknis jabatan fungsional;
- berkas Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
- Penetapan Angka Kredit (PAK);
- *database* jabatan fungsional.

BNP BINA POTENSI

01 Perencanaan dan Standardisasi Potensi

01 Rencana Pengembangan Potensi

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan pengembangan, penyusunan bahan pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina potensi, serta penyusunan rencana dan program pemeliharaan kompetensi potensi pencarian dan pertolongan, antara lain:

- laporan pelaksanaan pelatihan teknis potensi;
- laporan pelaksanaan kompetensi teknis potensi;
- laporan analisa kebutuhan pelatihan teknis potensi;
- laporan perencanaan pengembangan kompetensi;
- laporan evaluasi perencanaan dan standardisasi potensi.

02 Standardisasi Potensi

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, penilaian, analisis, dan evaluasi bidang bina potensi, rancang bangun kurikulum dan silabus, materi bahan ajar pendidikan dan pelatihan bagi potensi pencarian dan pertolongan, antara lain:

- peraturan terkait kompetensi teknis potensi;
- peraturan terkait pembinaan potensi;
- silabus dan kurikulum pelatihan teknis potensi;
- bahan ajar pelatihan teknis potensi;
- SOP bina potensi.

02 Pengelolaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Potensi)

01 Penyiapan Potensi

Naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang bina potensi dan penyiapan materi, pemeliharaan kompetensi, pemantauan, penilaian, dan evaluasi pembinaan potensi, antara lain:

- penyiapan bahan pembinaan potensi;
- perencanaan pembinaan potensi;
- laporan pelaksanaan pembinaan potensi (*workshop*, pelatihan potensi, jambore potensi, forum koordinasi potensi);
- laporan evaluasi pembinaan potensi (pemantauan, penerbitan rekomendasi kegiatan petualangan).

02 Sertifikasi Potensi

Naskah yang berkenaan dengan penyusunan materi, uji kompetensi, sertifikasi, penyusunan dan pengelolaan *database* potensi, antara lain:

- *database* potensi;
- uji kompetensi potensi;
- sertifikasi potensi.

03 Pemasyarakatan

Naskah yang berkenaan dengan bimbingan, sosialisasi, dan penyuluhan, penyiapan peralatan, sarana dan tenaga serta kegiatan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan, antara lain:

- sosialisasi Pencarian dan Pertolongan;
- diseminasi;
- bimbingan penyuluhan Pencarian dan Pertolongan;
- SAR *Goes to School* (kunjungan dari/ke sekolah, penerbitan buku dan pendampingan).

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



A. HARIS ACHADI